

# BAB 1

## PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan mengenai deskripsi umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di era sekarang, gerakan perempuan sudah mulai memperjuangkan isu mengenai peran dan partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Mulai dari ranah private hingga pada ranah kebijakan publik termasuk keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Sudah saatnya perempuan ikut serta dalam proses konversi input dalam sistem politik menjadi output berupa hukum atau kebijakan. Ketika ada perwakilan perempuan dalam proses politik, secara tidak langsung sudah memenuhi satu syarat yang menjamin bagi kebijakan yang dikeluarkan nantinya tidak bernuansa diskriminasi dan menjunjung tinggi kesetaraan gender di dalam penerapannya. Sehingga had irnya representasi perempuan dalam dunia politik akan mampu menyuarakan aspirasi mereka terutama dalam ranah kebijakan (Reader, the fight has changed, the stereotypes remain, and the cause will never die).

Kurangnya keterlibatan perempuan di parlemen yang mengakibatkan tidak terukupnya kuantitas yang telah ditetapkan merupakan hal yang hampir dialami oleh tiap negara. Saat ini, kuantitas paling tinggi mengenai jumlah perempuan di Parlemen terutama di Eropa yakni berada di negara-negara Nordic dan Belanda. Kenyataan, partisipasi perempuan di parlemen jika dikaji melalui aspek kuantitas, perempuan masih berada di dalam kategori minoritas. Walaupun mengalami tren peningkatan jumlah dari waktu ke waktu, namun hal ini masih belum bisa mencapai kesetaraan antar gender (politeethics, 2012).

Kurangnya partisipasi perempuan diparlemen dikarenakan masih lemahnya kebijakan penerapan gender di masing masing negara, namun Swedia merupakan salah satu negara anggota Uni Eropa yang berhasil menerapkan kebijakan kesetaraan gender. Hal ini disebabkan karena hadirnya kebijakan politik

luar negeri feminis yang telah berhasil meningkatkan partisipasi perempuan diparlemen Swedia. Meskipun terdapat bentuk perbedaan pemahaman tentang kebijakan feminisme antara Anglo-Saxon (Inggris), dan Eropa Daratan. Oleh karena itu, topik Pengaruh kebijakan politik luar negeri feminis terhadap peningkatan partisipasi perempuan diparlemen Swedia penting dikaji dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaruh kebijakan politik luar negeri Swedia terhadap peningkatan partisipasi politik perempuan di Swedia yang dapat langsung melibatkan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia yaitu tidak terpenuhinya kuota perempuan 30% diparlemen. Hal ini terjadi selain karena masyarakat dominan masih mengadopsi budaya patriarki, juga disebabkan karena eksistensi perempuan di dunia politik itu sangat rendah. Sebagai contoh, dalam kajian politik luar negeri menurut J. Ann Tickner (2011), sebagian kecil kaum perempuan memang berhasil menembus barikade dengan menjadi bagian dari kaum elite pembuat keputusan namun, mereka dipersepsi sebagai kelompok yang "terlalu emosional" dan "terlalu lemah" sehingga berpotensi membahayakan keselamatan negara ketika harus bersentuhan dengan masalah keamanan nasional dan integritas teritorial (Hadiwinata, 2017: 216-127).

Salah satu negara yang berhasil mengatasi tentang paradigma lama terhadap pengucilan perempuan adalah Swedia dengan menggunakan kebijakan politik luar negerinya. Swedia adalah negara yang mengakui bahwa saat ini masih banyak perempuan yang ter subordinasi oleh laki-laki. Sehingga, Swedia sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi nilai kesetaraan gender mengeluarkan kebijakan politik luar negeri feminis guna berusaha untuk meminimalisir ketidaksetaraan gender yang masih banyak terjadi di berbagai negara terutama di Swedia (Lenita, 2014).

Kebijakan luar negeri feminis pertama kali diluncurkan di dunia pada tahun 2014 ketika Wallstorm terpilih menjadi menteri luar negeri Swedia. Saat itu juga, langkah radikal diambil oleh Swedia demi tercapainya kesetaraan gender. Sebelumnya, isu kesetaraan gender memang selalu diperhatikan oleh pemerintah

namun pada tahun 2014 tersebutlah pemerintah Swedia benar benar mengambil langkah tegas untuk mewujudkan kesetaraan gender di negaranya. Meskipun pemenuhan hak terhadap perempuan terdapat peningkatan, namun masih banyak terjadi diskriminasi diberbagai bidang. Maka, melalui kebijakan politik luar negerinya, Swedia menegaskan bahwasanya perspektif gender harus dimasukkan dalam berbagai area politik luar negeri Swedia.

Tindakan tersebut dinilai sangat berani namun memiliki andil yang cukup besar untuk pencapaian kesetaraan gender dan pemenuhan hak asasi manusia secara penuh untuk semua perempuan dan laki-laki. Tidak hanya itu, Swedia juga berharap, melalui politik luar negeri feminis ini, perdamaian dunia secara berangsur-angsur dapat tercapai dengan semakin memperhatikan posisi perempuan dalam berbagai hal, khususnya dalam penyelesaian konflik dan pengambilan kebijakan (Foreign Affairs Ministry of Sweden).

Seiring dengan meningkatnya jumlah organisasi perempuan dan isu partisipasi perempuan di ranah publik, persentase keterlibatan perempuan di ranah politik pun lambat laun semakin meningkat di Swedia. Meskipun pada tahun 1971, jumlah perempuan di parlemen masih 14%, namun sejak pemilihan umum 1994, persentase perwakilan perempuan di parlemen mencapai angka 40%, dan sejak saat itu, persentase perempuan tidak pernah kurang dari 40% dalam setiap pemilihan umum. Pada tahun 1994 tepatnya ada 41% perempuan di parlemen, tahun 1998 ada 43%, tahun 2002 ada 45%, tahun 2006 ada 47,3%, 2010 ada 45% dan tahun 2014 44%. Angka tertinggi yaitu pada pemilu 2006, mencapai 47,3% perempuan yang terpilih untuk duduk di kursi parlemen (Lenita, 2014).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh kebijakan politik luar negeri feminisme Swedia terhadap peningkatan partisipasi politik perempuan di parlemennya?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang berjudul pengaruh kebijakan luar negeri feminis terhadap peningkatan partisipasi perempuan di parlemen Swedia ini yang pertama, yaitu untuk menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri feminis Swedia, dan pengaruhnya terhadap peningkatan partisipasi perempuan di parlemen. Kedua menjelaskan tentang kebijakan luar negeri feminis Swedia yang sangat berperan penting dalam mengangkat isu kesetaraan gender melalui berbagai forum dialog internasional dan melalui komitmen bantuan kemanusiaan yang berbasis pada gender mainstreaming. Ketiga, menambah kajian mengenai studi feminisme di negara bagian Eropa khususnya Swedia, untuk studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas AMIKOM Yogyakarta mengingat masih kurangnya buku-buku dan penelitian yang tersedia. Serta keempat, penelitian ini juga bertujuan sebagai pemenuhan tugas akhir program Strata 1 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas AMIKOM Yogyakarta.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yang pertama, yaitu memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hubungan internasional, khususnya dalam studi kawasan eropa, studi penerapan kebijakan, serta studi gender. Kedua, menambah referensi untuk para penstudi hubungan internasional dalam menyusun berbagai tugas ilmiah, seperti paper, jurnal, skripsi, dan lain lain. Ketiga, memberikan informasi dan inspirasi untuk berbagai pihak, khususnya para pemangku kebijakan, untuk mencari solusi atas permasalahan terkait gender.

#### **1.5 Sistematika Bab**

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis kedalam beberapa bab, dan masing masing bab sendiri akan menjelaskan masalahnya masing masing sesuai dengan takaran penulisan skripsi. Bab-bab tersebut diuraikan sebagai berikut.

### **BAB 1. PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan mengenai deskripsi umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, terdiri dari empat sub bab yang membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

## **BAB III. METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini, menguraikan tentang jenis penelitian dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan teknis analisis data serta variabel penelitian dan sesuai kebutuhan penelitian.

## **BAB IV. ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI FEMINIS TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI PARLEMEN SWEDIA**

Pada bab ini, akan menguraikan hasil analisis dan bukti bukti yang ditemukan dari permasalahan penelitian yang relevan dengan konsep dan hipotesis serta metode yang digunakan.

## **BAB V. PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup, yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.